

Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Pertanian di Desa Wilayut

Oleh :

Ashila Mitha Purnamasari

Dosen Pembimbing :

Hendra Sukmana, M.KP

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
2025

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa di Indonesia memegang peran penting sebagai unit pemerintahan terkecil yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan kehidupan masyarakat setempat. Sebagai entitas pemerintahan yang paling dekat dengan warga, desa bertanggung jawab dalam merancang serta menjalankan berbagai kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup penduduknya. Transparansi dalam pengelolaan dana desa harus dijunjung tinggi agar setiap anggaran digunakan. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui program pelatihan dan penyuluhan berkelanjutan menjadi langkah strategis mendapat keterampilan untuk menerapkan metode pertanian agar inovatif dan ramah lingkungan.

Pemerintah Desa Wilayat telah menginisiasi berbagai program untuk mendukung pengembangan sektor pertanian, termasuk penyediaan bibit unggul, pembangunan irigasi, dan alat pertanian modern guna meningkatkan produktivitas. Untuk memastikan pemanfaatan fasilitas secara optimal, desa juga mengadakan pelatihan bagi petani agar lebih efisien dalam menerapkan teknologi pertanian. Perhatian besar diberikan pada sistem irigasi dengan pembangunan saluran air dan plengsengan guna menjamin distribusi air merata, terutama saat musim kemarau. Selain itu, pavingisasi jalan sawah dilakukan untuk memperlancar mobilitas petani, menekan biaya logistik, dan mempercepat distribusi hasil panen ke pasar. Fasilitas penyimpanan juga disediakan agar hasil panen tetap segar, memungkinkan petani menjual produk pada waktu yang lebih menguntungkan dan mengurangi kerugian akibat pembusukan. Meski beberapa program telah dijalankan, sejumlah tantangan masih menghambat optimalisasi sektor ini.

Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Pertanian di Desa Wilayut.

PENELITIAN TERDAHULU

1. K. Ariyanto, "Intervensi Pemerintah Desa dalam Program Pembangunan Pertanian: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik di Konteks UU Desa 2014," *JIAPI J. Ilmu Adm. Dan Pemerintah. Indones.*, vol. 3, no. 2, pp. 164–180, 2022, doi: 10.33830/jiapi.v3i2.108.
2. I. Tarigan, W. M. Sembiring, and N. Angelia, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Potensi Pertanian Desa Di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan," *J. Ilm. Adm. Publik dan Pemerintah.*, vol. 3, no. 1, pp. 43–51, 2024, doi: 10.31289/jiaap.v3i1.2203.
3. S. Setianingsih and R. R. Mameyao, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Di Desa Pusian Barat Kecamatan Dumog Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara," *J. Adhikari*, vol. 2, no. 2, pp. 318–329, 2022, doi: 10.53968/ja.v2i2.66.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

- Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.

Fokus Penelitian

- Untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pengembangan pertanian di desa wilayah kabupaten sidoarjo

Teknik Penentuan Informan

- Metode purposive sampling yaitu Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), perangkat desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan petani setempat.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara menyeluruh terhadap informan yang telah ditentukan sebelumnya karena dianggap mempunyai pemahaman yang mendalam.

Teknik Analisis Data

- Mengadopsi model analisis interaktif yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman (1992), yang mencakup empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menggunakan pendekatan teori peran pemerintah menurut Suhardono, yang mencakup fungsi sebagai fasilitator, mobilisator, dan regulator.

A. Fasilitator

Pemerintah desa lebih banyak menyediakan peralatan pertanian yang bersifat teknis dibandingkan membangun infrastruktur yang dapat meningkatkan efisiensi pertanian dalam jangka Panjang

Gambar 1. Sarana dan Prasarana yang Diberikan Pemerintah Desa Wilayat



(kiri: mesin combi; kanan: handtraktor)



(kiri: mesin diesel; kanan: sprayer elektrik)

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada gambar ini mengonfirmasi bahwa kendala finansial menjadi faktor utama yang menghambat pembangunan sistem irigasi yang layak. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam perencanaan anggaran, di mana keputusan alokasi dana lebih berorientasi pada kebutuhan jangka pendek dibandingkan solusi jangka panjang. Sebagai fasilitator, pemerintah desa seharusnya mampu menjadikan pembangunan infrastruktur pertanian sebagai prioritas utama, bukan hanya sebagai proyek sampingan yang bergantung pada ketersediaan dana. Dalam konteks ini, inovasi dalam pengelolaan anggaran menjadi solusi yang harus diperhatikan, salah satunya melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dapat berperan sebagai mitra strategis dalam pengelolaan keuangan, pelaksanaan proyek irigasi, serta penyediaan kebutuhan pertanian seperti pupuk dan peralatan pertanian.

Selain aspek infrastruktur, pemerintah desa juga perlu membekali petani dengan pelatihan dan penyuluhan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem irigasi dan peralatan pertanian yang telah diberikan. Penyuluhan yang berkelanjutan dapat memastikan bahwa para petani tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga mampu mengelola dan memelihara sarana pertanian secara mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

B. Mobilisitor

Sebagai mobilisator, pemerintah desa harus mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang tersedia dan mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebutuhan pupuk petani dapat terpenuhi. meskipun pemerintah desa telah melakukan beberapa langkah sebagai mobilisator, upaya yang dilakukan masih belum cukup untuk mengatasi permasalahan keterbatasan pupuk. Pemerintah desa perlu lebih proaktif dalam menjalin kemitraan dengan berbagai pihak serta memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih efektif agar kebutuhan petani dapat terpenuhi secara lebih optimal.

C. Regulator

Jika dikaitkan dengan teori (Suhardono, 2016), fakta bahwa tugas aparaturnya desa sebagai regulator dalam pengembangan pertanian belum sepenuhnya optimal. Teori ini menegaskan seharusnya terdapat tugas kuat dalam merumuskan regulasi, mengawasi pelaksanaannya, dan menegakkan hukum guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan sektor pertanian. Namun, dalam hal ini mengungkapkan bahwa aparaturnya desa masih kurang dalam melakukan sosialisasi serta penegakan aturan terkait larangan membuang sampah di sungai, yang berdampak pada kualitas irigasi pertanian. Tidak adanya Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur sanksi bagi pelanggar menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif dari kebiasaan tersebut. Selain itu, lemahnya pengawasan dalam implementasi aturan membuat pelanggaran terus berulang tanpa tindakan yang signifikan. Agar peran pemerintah desa sesuai dengan teori yang digunakan, diperlukan kebijakan yang lebih tegas, sosialisasi yang berkelanjutan, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan penerapan sanksi yang lebih efektif. Selanjutnya penelitian (Tarigan et al., 2024), temuan ini sejalan dengan hasil studi mereka yang menunjukkan bahwa peran regulator pemerintah desa masih lemah, terutama dalam aspek penyuluhan dan edukasi bagi petani. Seperti yang terjadi di Desa Wilayut, penelitian tersebut juga menyoroti kurangnya efektivitas regulasi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran petani mengenai pengelolaan pertanian serta upaya mitigasi hama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Wilayat dalam pengembangan sektor pertanian dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama berdasarkan teori peran pemerintah menurut Suhardono, yaitu sebagai fasilitator, mobilisator, dan regulator:

- 1) Sebagai fasilitator, pemerintah desa telah menyalurkan dana untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian, termasuk perbaikan infrastruktur jalan, pemeliharaan alat pertanian, dan optimalisasi sistem irigasi, meskipun keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama.
- 2) Sebagai mobilisator, pemerintah desa berperan dalam mengoordinasikan distribusi pupuk agar lebih merata serta menjalin kemitraan dengan sektor swasta guna menjamin ketersediaan sarana pertanian yang memadai. Namun, keterbatasan dalam koordinasi dan pengawasan masih menyebabkan kendala dalam efektivitas kebijakan ini.
- 3) Sebagai regulator, pemerintah desa telah menetapkan regulasi terkait pengembangan pertanian, termasuk larangan pembuangan sampah ke sungai dan saluran irigasi, tetapi lemahnya penegakan hukum dan minimnya sosialisasi menyebabkan kebijakan ini kurang efektif.

TERIMA KASIH